PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI

Disusun oleh:

Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE, MSc.
Yeni Listiani, S.Si., M.Si.

CIMAHI
SALUYU NGAWANGUN JATI MANDIRI

BADAN LEGISLATIF DPRD KOTA CIMAHI
Tahun Anggaran 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi kami panjatkan karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, maka Laporan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi telah berhasil disusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan DPRD Kota Cimahi dalam merancang RAPERDA Pengelolaan Sampah yang sahih, legal, dan *legitimate*, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi pada umumnya dan pemerintah Kota Cimahi pada khususnya. Uraian dalam laporan ini tidak mustahil disertai dengan kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan tanggapan terhadap substansi atau materi laporan ini sangat diharapkan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Terimakasih atas perhatiannya.

Cimahi, Juni, 2011

Tim Penyusun

Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE, MSc.
Yeni Listiani, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DAFTAR ISI ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 6
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN LAPORAN 9
1.4 TUJUAN 10
1.5 METODE PENELITIAN 10

BAB II ASAS-ASAS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH **11**

2.1 TEORI DASAR PENGELOLAAN SAMPAH 11
2.2 KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH EKSISTING DI KOTA CIMAHI 24

BAB III MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF **40**

3.1 KAJIAN ATAU ANALISIS TENTANG KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN HUKUM POSITIF 40

BAB IV PENUTUP **52**

4.1 KESIMPULAN 52
4.2 REKOMENDASI 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timbulan sampah di kota-kota besar Indonesia terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data *National Urban Development Strategy (NUDS)* Tahun 2003 potensi sampah kota di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 100.000 ton/hari. Berdasarkan data Desember, 2010 Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi, menunjukkan bahwa timbulan sampah Kota Cimahi mencapai 1.407 m^3 atau sekitar 281 ton per hari. Proporsi sampah di Kota Cimahi adalah sebagai berikut: kapasitas sampah yang terkelola adalah sebanyak 65% (yang diangkut ke TPK Sarimukti sebanyak 238 m^3/hari), pengelolaan di Plan Kompos, pemanfaatan oleh sebagian masyarakat dan sisanya masih ada yang dibuang ke sungai atau dilakukan pembakaran terbuka. Kandungan sampah dari Kota Cimahi umumnya mengandung sekitar 65% sampah organik (DPLK Kota Cimahi, 2010).

Berdasarkan data hingga bulan November 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Cimahi telah mencapai 608.143 jiwa (Profil Kependudukan Kota Cimahi Bulan Juni 2010, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2010), sehingga volume timbulan sampah diperkirakan mencapai 1.429 m^3/hari. Peningkatan jumlah penduduk kota yang berbanding lurus dengan meningkatnya timbulan sampah yang tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan konsep pembuangan akhir (Tempat Pembuangan Akhir/TPA) tanpa pengelolaan terintegrasi akan menghadapi masalah berkelanjutan seperti terbatasnya daya dukung lahan, terjadinya epidemik penyakit, penurunan harga lahan terdekat, menurunnya produksi panen, tercemarnya tanah air dan udara serta dimungkinkan adanya bencana longsor, seperti longsor yang terjadi di TPA Leuwigajah tanggal 21 Februari 2005 yang menghancurkan 139 rumah dan lebih dari 143 orang tewas terkubur. Bencana tersebut terjadi karena pemerintah tidak melakukan prosedur operasional TPA yang sesuai dengan metode *sanitary landfill* (tidak adanya *under drainage*, saluran gas, tanah penutup) khususnya untuk kestabilan timbunan sampah dan pengelolaan terpadu lainnya yang melibatkan aspek sosial masyarakat. Pengelolaan sampah